

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan milik negara yang dibangun dengan peran sebagai penghasil uang bagi negara untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, pendirian BUMN juga memiliki maksud lain dalam kaitannya membantu pemerintah untuk memberikan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Hal ini ditegaskan pada pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, “Salah satu maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat”.

Keterlibatan BUMN dalam memberikan bantuan ekonomi kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat ditegaskan lagi oleh Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-09/MBU/07/2015, PER-03/MBU/12/2016, dan PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Program ini dikenal sebagai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan hanya ada pada lingkungan BUMN.

PKBL sebetulnya merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau dalam istilah umumnya dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun demikian PKBL tidak bisa disamakan dengan CSR yang sebagaimana harus dilakukan oleh perseroan. Di mana CSR merupakan program wajib bagi perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Mengenai hal ini telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 74 dan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Sedangkan pelaksanaan PKBL sumber dananya disisihkan maksimal sebesar 4% (empat persen) dari laba bersih, seperti tercantum pada PER-09/MBU/07/2015 pasal 8. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN yang tidak memperoleh laba tidak wajib melakukan PKBL, sedangkan perusahaan negara yang memperoleh laba wajib melaksanakan PKBL.

PKBL mencakup dua pelaksanaan program, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program Kemitraan membantu pengusaha ekonomi kecil, menengah, koperasi, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan berupa pinjaman modal kerja, pinjaman untuk pembelian aset tetap, dan pinjaman tambahan berjangka untuk mengembangkan dan memajukan usaha mereka. Program Kemitraan merangsang pertumbuhan usaha kecil agar menjadi usaha yang mandiri dan tangguh. Menurut Mudjiarto (2016) dalam penelitiannya keberhasilan suatu program pembinaan khususnya pelatihan, tidak hanya dapat dilihat pada program selesai dilakukan. Tetapi perlu pengamatan terintegritas pembina dalam melihat perubahan yang ada. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat

tentunya rakyat pun akan lebih sejahtera. Hal lain yang menarik dari Program Kemitraan adalah adanya pembinaan berupa pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/ penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.

Bina Lingkungan juga sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat sekitar lingkungan perusahaan. Melalui program ini, kondisi sosial masyarakat di sekitar perusahaan diberdayakan, misalnya melalui pemberian bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan yang berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, serta bantuan sosial kemasyarakatan dalam pengentasan kemiskinan.

Pelaksanaan PKBL menjadi bagian penting bagi semua khalayak yang terkait di dalamnya, yaitu pemerintah, BUMN, dan masyarakat yang dalam hal ini setiap UKM (Usaha Kecil Menengah) mitra binaan BUMN. Program ini merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada rakyat untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional dan menyejahterakan rakyat dengan menjadikan masyarakat yang mandiri. Dan bagi BUMN sendiri ini merupakan sebuah nilai positif jika BUMN mampu memberikan PKBL. Pelaksanaan PKBL bisa memberikan dampak pada citra dan reputasi BUMN di mata publik. Dengan adanya pelaksanaan PKBL tentu masyarakat dapat melihat bahwa perusahaan negara tersebut sehat, memperoleh laba, memberikan keuntungan bagi negara, dan tentunya hal ini menjadi sebuah penilaian yang baik di mata publik.

Membahas mengenai penilaian yang baik dari publik, tentu tidak terlepas dari peran humas dalam sebuah organisasi. Sebagai corong organisasi, humas harus mampu menciptakan sebuah penilaian yang positif di khalayak. salah satunya melalui kegiatan eksternal humas. Penulis melihat keterkaitan PKBL dengan humas karena PKBL dapat dikatakan sebagai kegiatan eksternal kehumasaan (*Community Involvement*) BUMN. Bagaimana humas mampu membangun citra perusahaan (BUMN) melalui sebuah kegiatan (PKBL). Tidak hanya sekedar menjalankan *mandatory* dari pemerintah, namun bagaimana PKBL diberikan secara efektif dan tepat guna kepada setiap individu mitra binaan (UKM) agar dapat melahirkan sebuah persepsi positif secara menyeluruh di mata publik. Dengan demikian, kedepannya akan melahirkan reputasi yang baik bagi BUMN itu sendiri dan juga bagi pemerintah.

Persepsi sebagai bagian dari komunikasi sesungguhnya merupakan inti dari sebuah proses komunikasi. Bagaimana komunikasi menerima pesan komunikasi, mengolah, memahami, memroses, dan memberikan kesan atas pesan yang diterimanya. Dari sebuah persepsi akan melahirkan opini, dari opini yang terbentuk akan berpengaruh terhadap reputasi organisasi. Mengacu pada penjelasan tersebut maka sangatlah penting bagi humas untuk mengetahui apa sebetulnya persepsi yang diberikan publik terhadap kinerja organisasinya. Bagaimana persepsi itu bisa terbentuk dan faktor-faktor apa saja yang mungkin berhubungan dengan persepsi yang diberikan oleh publik.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis melihat adanya keterkaitan antara pelaksanaan PKBL dan manfaatnya bagi masyarakat terutama UKM sebagai

sasaran khalayak yang terlibat langsung menerima program ini, persepsi yang diberikan oleh UKM terhadap PKBL BUMN, demikian juga manfaat sebaliknya bagi BUMN. Melihat hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sesungguhnya kepedulian BUMN dalam melakukan PKBL.

Kerenanya untuk melihat gejala awal, penulis mencoba menanyakan persepsi beberapa responden dari UKM sebagai khalayak sasaran Program Kemitraan mengenai Program Kemitraan BUMN dan hasilnya sebagai berikut:

Responden 1 mengungkapkan bahwa Program Kemitraan ini positif karena banyak memberikan bantuan, baik itu berupa bantuan modal usaha, bantuan pinjaman jangka pendek, promosi, pemasaran (dalam dan luar negeri), pelatihan, serta pemberian bantuan alat produksi (aset tetap) untuk mengembangkan produk. Dalam menerima Program Kemitraan, responden 1 tidak melalui proses yang sulit, karena BUMN tersebut yang berperan aktif dalam mencari mitra binaan serta memberikan program bantuan. Padahal beberapa tahun sebelumnya, responden 1 memiliki persepsi negatif terhadap Program Kemitraan BUMN karena dikecewakan oleh ‘janji-janji manis’ program ini, namun tidak terealisasikan dan proses yang dilaluinya begitu sulit.

Responden 2 mengungkapkan bahwa Program Kemitraan ini positif karena memberikan bantuan yang berkesinambungan, baik bantuan modal usaha, bantuan pinjaman jangka pendek, promosi, pemasaran (dalam negeri), dan pelatihan. Responden 2 tidak merasakan adanya kesulitan dalam mengajukan bantuan karena BUMN berperan aktif dalam menawarkan program bantuan itu sendiri. Awal

keikutsertaan responden 2 dalam Program Kemitraan juga karena peran aktif BUMN dalam mencari mitra binaan.

Responden 3 dan 4 tidak mengetahui apa itu Program Kemitraan, namun setelah penulis tanyakan lebih jauh, ternyata program bantuan yang diterimanya adalah Program Kemitraan, karena para responden mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha, bantuan pinjaman jangka pendek, promosi, pemasaran, dan pelatihan. Responden 3 dan 4 hanya mengetahui bahwa BUMN memberikan bantuan untuk UKM. Namun responden 3 berharap agar dukungan dalam hal promosi lebih banyak lagi, sedangkan responden 4 merasa apa yang diterimanya sudah cukup membantu usahanya.

Responden 5 memberikan masukan agar modal pinjaman yang diberikan oleh BUMN bisa lebih besar lagi nominalnya dan program promosi seperti pameran diberikan lebih banyak lagi kesempatannya bagi mitra binaan untuk ikut serta.

Responden 6 memberikan persepsi negatif terhadap program bantuan BUMN karena informasi yang diterimanya, bahwa persyaratannya memberatkan, dan responden 6 kesulitan mencari informasi aktual Program Kemitraan di BUMN di daerahnya karena tidak mendapatkan respon yang baik dari petugas yang pernah dihubungi.

Dari persepsi beberapa responden di atas, penulis memperoleh hasil adanya persepsi positif dan negatif terhadap kepedulian BUMN melakukan PKBL. Sangat disayangkan bahwa program yang notabene adalah sebuah bantuan, yang secara logika harusnya dipersepsikan secara positif bahkan sangat positif namun, penulis

justru menemukan persepsi negatif terhadap PKBL. Penulis menyadari bahwa ini adalah temuan awal yang tidak dapat diberlakukan secara umum.

Melihat ragam gejala permasalahan di atas, penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana persepsi sesungguhnya UKM terhadap kepedulian BUMN dalam melakukan PKBL. Karenanya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan tepat sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, penulis membutuhkan sebaran populasi yang lebih banyak lagi. Tentunya populasi ini penulis batasi pada UKM penerima program PKBL atau disebut sebagai mitra binaan. Populasi ini tersebar di seluruh Indonesia dan Surabaya merupakan salah satu wilayah dengan sebaran populasi yang paling banyak menerima PKBL. Oleh karenanya, penulis membatasi populasi penelitian ini pada UKM mitra binaan BUMN di Surabaya dan sekitarnya.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat keterkaitan antara pelaksanaan PKBL dan manfaat bagi khalayaknya, serta adanya gejala permasalahan yang penulis temui di lapangan dan telah diuraikan di atas mengenai persepsi dari beberapa responden terhadap pelaksanaan program PKBL di mana adanya responden yang memberikan persepsi positif dan negatif, merupakan temuan awal yang tidak dapat digunakan oleh penulis sebagai hasil penelitian yang akurat. Apakah persepsi UKM terhadap kepedulian BUMN dalam melakukan PKBL positif atau negatif? Serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi persepsi? Karenanya untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis membutuhkan lebih banyak sebaran populasi UKM agar dapat menjawab rumusan masalah yang akan diteliti:

“Bagaimana persepsi UKM mitra binaan BUMN di Surabaya dan sekitarnya terhadap Kepedulian BUMN dalam melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui persepsi khalayak, dalam hal ini UKM mitra binaan BUMN di Surabaya dan sekitarnya, mengenai kepedulian BUMN dalam melakukan PKBL.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi persepsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi BUMN agar kepeduliannya dalam melaksanakan PKBL dapat ditingkatkan lagi.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi keberlakuan Teori Perbedaan Individual dalam pelaksanaan PKBL BUMN.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab 1, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2, Tinjauan Pustaka yang berisi tentang PKBL (bagian dari CSR), persepsi, operasional variabel, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Bab 3, Metodologi Penelitian yang berisi tentang desain penelitian, bahan penelitian dan unit analisis, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, validitas & reliabilitas, dan analisis data.

Bab 4, Hasil Penelitian & Pembahasan yang berisi tentang subyek penelitian, identitas responden, hasil penelitian, hubungan jenis kelamin dengan persepsi, hubungan usia dengan persepsi, dan pembahasan.

Bab 5, Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.